

Pendidikan Sebagai Sarana Emansipasi Sosial: Kajian terhadap Program *Studiefonds* di Mangkunegaran 1912–1944

Education as a Means of Social Emancipation: A Study of the Studiefonds Program in Mangkunegaran 1912–1944

<p>Ahmad Dzaky Benson Irani¹, Nor Huda², Moh. Ashif Fuadi³, Aan Ratmanto⁴, Adrian Perkasa⁵ 1,2,3,4, UIN Raden Mas Said Surakarta ⁵ Leiden University ✉ mahdimubarok77@gmail.com</p>	<p>Article history: Submitted: 12 November 2025 Accepted: 28 April 2026 Published: 13 Mei 2026</p>
--	--

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tentang peran *Studiefonds* Mangkunegaran sebagai instrumen filantropi pendidikan dalam mendorong transformasi sosial masyarakat pada era kolonial. Sebagai inisiatif mandiri, lembaga ini hadir untuk mengatasi hambatan ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan modern demi meningkatkan derajat sosial. Dengan menggunakan metode historis yang bersumber pada arsip primer Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran, kajian ini mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan pemicu utama modernitas di Praja Mangkunegaran. *Studiefonds* yang didirikan pada tahun 1912 berdasarkan Pranatan Pustaka Praja (*Rijksblad*) 15 Oktober 1913 ini pada awalnya bersifat eksklusif bagi golongan sentono dan priyayi. Namun, kebijakan tahun 1915 menandai pergeseran signifikan melalui pemberian akses peringanan biaya pendidikan bagi masyarakat umum. Program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan sekolah, tetapi juga membentuk mobilitas sosial baru melalui lahirnya kelompok terdidik pribumi yang kemudian berperan dalam birokrasi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran *Studiefonds* menunjukkan adanya kesadaran elite Mangkunegaran terhadap pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan dan emansipasi sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan model kemandirian finansial pribumi sebagai bentuk resistensi terhadap restriksi pendidikan kolonial, yang memberikan kontribusi penting bagi historiografi pendidikan serta kajian filantropi di Indonesia, khususnya dalam konteks modernisasi masyarakat Jawa pada awal abad ke-20.

Kata Kunci: Pendidikan; Pura Mangkunegaran; *Studiefonds*

Abstract: This study analyzes the role of the Mangkunegaran *Studiefonds* as an educational philanthropy instrument in encouraging social transformation during the colonial era. As an independent initiative, this institution was established to overcome the economic barriers that prevented people from accessing modern education in order to improve their social status. Using the historical method based on primary archival sources from the Rekso Pustoko Library of Mangkunegaran, this study reveals that education became the main driving force of modernity within the Mangkunegaran Principality. The *Studiefonds*, founded in 1912 under the Pranatan Pustaka Praja (*Rijksblad*) of October 15, 1913, was initially exclusive to the sentono and priyayi classes. However, the 1915 policy marked a significant shift through the provision of tuition relief and educational assistance for the wider community. This program not only supported educational expenses but also fostered new social mobility through the emergence of educated indigenous groups who later played important roles in bureaucracy, education, and social life. The existence of the *Studiefonds* demonstrates the awareness of the Mangkunegaran elite regarding the importance of education as a means of progress and social emancipation. The novelty of this research lies in its emphasis on indigenous financial independence as a form of resistance against colonial educational restrictions, thereby contributing significantly to the historiography of education and philanthropy studies in Indonesia, particularly in the context of the modernization of Javanese society in the early twentieth century.

Keywords: Education; Pura Mangkunegaran; *Studiefonds*

P-ISSN 2798-186X E-ISSN 2798-3110 © 2026 author(s)

Published by FAB UIN Surakarta, this is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

DOI: 10.22515/isnad.v7i01.13183

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia sesungguhnya telah mengalami perkembangan sejak lama, bahkan Sebelum diberlakukannya Politik Etis dan sebelum berdirinya institusi pendidikan formal (modern). Pada masa tersebut, masyarakat telah memiliki pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, Meskipun masih diselenggarakan secara tradisional dan non-formal. Contoh pendidikan tradisional seperti kegiatan pendidikan pada masa itu umumnya berlangsung di lingkungan keluarga, dengan mengedepankan peran orang tua sebagai fasilitator utama pembelajaran. Selain itu, pendidikan juga diselenggarakan di Surau dan Pesantren melalui sistem pendidikan berbasis pondok. Namun, karena pendidikan tersebut bersifat tradisional dan non-formal, cakupan serta aksesibilitasnya masih terbatas, sehingga belum mampu mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika zaman.¹

Pada masa itu, pendidikan yang diterima masyarakat berfokus pada pembentukan budi pekerti yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Materi pembelajaran mencakup penghafalan, membaca dan menulis Al-Quran, serta penguasaan keterampilan dasar dalam membaca dan menulis aksara lokal sesuai dengan karakteristik budaya masing-masing daerah. Selain itu, sistem pendidikan tradisional pada saat itu masih dipengaruhi oleh pandangan hidup masyarakat yang kental dengan unsur kepercayaan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal.²

Sejak masa VOC hingga periode kolonial Belanda, perkembangan teknologi di Nusantara turut disertai dengan diperkenalkannya sistem pendidikan modern. Namun, akses terhadap pendidikan tersebut bersifat eksklusif dan tidak diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat pribumi. Tujuan utama pendidikan modern yang dikenalkan oleh kolonial adalah membentuk tenaga kerja lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi kolonial, tanpa perlu mendatangkan pekerja dari wilayah Eropa.³

Kehadiran pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial secara tidak langsung telah menggoyahkan eksistensi pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional dianggap tidak relevan untuk mendukung kemajuan birokrasi pemerintahan kolonial.⁴ Dibalik penyelenggaraan pendidikan modern, terselip agenda ideologis yang tersembunyi. Kolonial

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, dari Budi Utomo sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997). hlm. 62.

² Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 8-9.

³ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Salemba Diniyah: 2017), hlm. 53-54.

⁴ Azyumardi Azra, *Surau; Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 92-93.

memberikan akses pendidikan bukan semata-mata untuk tujuan pencerahan, melainkan sebagai strategi kontrol sosial. Melalui pendidikan yang dibatasi ruang lingkungannya dan diarahkan sesuai kepentingan kolonial, masyarakat pribumi tetap dijaga dalam kondisi ketertinggalan, ketidaksadaran, serta keterkungkungan intelektual agar tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya tengah dijajah secara sistemik.⁵

Abad ke-20 telah mengubah kebijakan kolonial Belanda yang awalnya gencar untuk mengeksploitasi kemudian beralih ke pernyataan kepedulian terhadap kesejahteraan kaum pribumi.⁶ Menurut van Deventer menjelaskan bahwa wilayah Nusantara telah berjasa membantu memulihkan perekonomian pemerintah Belanda di Eropa, maka dari itu sudah sewajarnya kaum pribumi mendapatkan hadiah oleh pemerintah dengan Politik Etis.⁷ Penerapan Politik Etis khususnya dalam bidang pendidikan, mendorong perluasan akses terhadap pendidikan modern di berbagai wilayah Nusantara. Di wilayah Surakarta, pemerintah Mangkunegaran sebagai salah satu daerah *vorstenlanden* turut menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan bagi rakyatnya melalui berbagai inisiatif yang sejalan dengan kebijakan etis kolonial. Kehadiran pendidikan modern di Mangkunegaran Surakarta mendorong pemimpinnya masa itu yakni Mangkunegara VI dan VII untuk meneladani upaya dari Wahidin Soedirohoesodo dalam mendirikan *Studiefonds* (program beasiswa) sebagai bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan bagi rakyatnya.⁸

Penelitian ini memfokuskan kajian pada wilayah Mangkunegaran dengan periodisasi 1912-1944. Keberadaan *Studiefonds* Mangkunegaran merupakan wujud upaya Praja Mangkunegaran dalam meningkatkan derajat dan martabat masyarakat melalui program pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berupaya melakukan kajian secara mendalam terhadap *Studiefonds* Mangkunegaran sebagai salah satu bentuk program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Praja Mangkunegaran.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana kemunculan pendidikan modern di Praja

⁵ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 18.

⁶ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono dkk (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 319.

⁷ Harry A.Poeze, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950*, Terj. Hazil Tanzil (Jakarta: KPG, 2018), hlm. 28.

⁸ Wasino, "Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran (1900-1945)", *Laporan Penelitian*. Semarang, IKIP Semarang, 1996, tidak diterbitkan, hlm. 24.

⁹ Mokhammad Fadhil Musyafa, "Sinar Surya Dari Balik Pare Muda: Peran KGPAA Mangkunegaran VII Dalam Pendidikan Keagamaan Islam di Mangkunegaran Tahun 1916-1944." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 15. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i1.4910>.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

Mangkunegaran?. Kedua, bagaimana lahirnya program *Studiefonds* di Nusantara?. Ketiga, bagaimana dukungan Praja Mangkunegaran terhadap pendidikan lewat program *Studiefonds*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis peran strategis *Studiefonds* Mangkunegaran dalam konstelasi pendidikan masa kolonial sebagian upaya mandiri masyarakat pribumi untuk mencapai kemajuan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan sejarah, khususnya mengenai perkembangan pendidikan modern dan pelaksanaan *Studiefonds* di wilayah Surakarta, dengan fokus pada lingkungan Praja Mangkunegaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan mengikuti tahapan-tahapan sistematis, yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo dalam karyanya *Pengantar Ilmu Sejarah*.¹⁰ Topik penelitian ini ditetapkan melalui pertimbangan akademis yang mencakup aspek relevansi keilmuan, ketersediaan sumber primer, serta keterlibatan afektif peneliti terhadap objek kajian, yaitu Pura Mangkunegaran. Peneliti secara intensif melakukan studi pustaka dan kunjungan lapangan ke perpustakaan Rekso Pustoko, yang kemudian membuka akses terhadap dokumentasi historis mengenai *Studiefonds* Mangkunegaran sebuah lembaga yang merepresentasikan bentuk intervensi pendidikan dalam struktur kekuasaan lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran arsip, catatan harian, dan buku kas sezaman, yang berfungsi sebagai artefak tekstual untuk merekonstruksi dinamika pendidikan di lingkungan Mangkunegaran.¹¹

Dalam penelitian ini menerapkan kritik eksternal untuk menilai keaslian dokumen serta kritik internal guna membandingkan isi berbagai sumber dan memastikan validitas informasi. Tahap interpretasi dilakukan dengan menguraikan data secara analitis untuk menampilkan aspek kausalitas, menghubungkan fakta-fakta historis, serta membandingkan berbagai sumber. Peneliti berupaya meminimalkan bias melalui rujukan terhadap studi-studi terdahulu guna memperkuat kerangka analisis. Hasil penelitian disusun dalam bentuk historiografi yang menekankan kronologi dan konteks peristiwa, untuk menggambarkan dinamika pendidikan modern serta pelaksanaan program *Studiefonds* di Mangkunegaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah sejarah lokal sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemahaman historis mengenai perkembangan pendidikan modern dan program *Studiefonds* Mangkunegaran di masa tersebut.¹²

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 69.

¹¹ Kuntowijoyo, hlm. 70.

¹² Kuntowijoyo, hlm. 72-80.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Pendidikan Modern di Praja Mangkunegaran

Pada masa pelaksanaan politik etis di Praja Mangkunegaran, terdapat dua periode pemerintahan, yakni Mangkunegara VI (1896–1916) dan Mangkunegara VII (1916–1944). Keduanya pernah menempuh pendidikan modern di Belanda, yang membentuk pola pikir progresif, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran tersebut diwujudkan melalui prioritas pada pembangunan, khususnya di bidang pendidikan sebagai bagian dari strategi modernisasi dan kemajuan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dituntut untuk beradaptasi agar tidak tertinggal. Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu sarana utama dalam menghadapi perubahan tersebut. Oleh karena itu, sejak awal abad ke-20, Pemerintahan Mangkunegaran mulai memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Mangkunegara VI menjadi pelopor dengan mendirikan sejumlah sekolah modern, di antaranya:¹³

Sekolah Siswo

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah modern pertama yang dimiliki oleh Praja Mangkunegaran. Didirikan pada tahun 1912 dan berlokasi di Pendopo Agung, sekolah ini diperuntukkan khusus bagi kalangan kerabat dan keturunan Mangkunegaran, dengan dominasi peserta didik laki-laki. Setelah dua tahun beroperasi, pada tahun 1914 Sekolah Siswo mengalami transformasi menjadi *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) yang kemudian dikenal sebagai *Mangkoenagaransche School*.

Sekolah Sisworini

Bersamaan dengan pendirian Sekolah Siswo pada tahun 1912, Mangkunegaran juga mendirikan Sekolah Sisworini, sebuah lembaga pendidikan khusus perempuan yang berlokasi di halaman istana. Awalnya, Sisworini berfokus pada pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Seiring waktu, sekolah ini berkembang dengan tujuan mempersiapkan perempuan menjadi ibu rumah tangga yang terampil dan cakap dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah masa pemerintahan Mangkunegara VI berakhir, Mangkunegara VII menggantikan tahtanya dan melanjutkan perhatian serius terhadap pendidikan rakyat. Ia tidak hanya meneruskan program Sekolah yang sudah berjalan, tetapi juga mengembangkan berbagai inisiatif pendidikan baru.¹⁴ Beberapa sekolah yang didirikan dan dikembangkan oleh Mangkunegara VII antara lain:

Van Deventer (*Solosche Van Deventer-School*)

Sekolah Van Deventer merupakan lembaga pendidikan berasrama khusus bagi perempuan pribumi dari latar belakang terhormat. Tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk membekali para

¹³ Wasino, "Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran (1900-1945)", *Laporan Penelitian*. Semarang, IKIP Semarang, 1996, tidak diterbitkan, hlm. 24-25.

¹⁴ Wasino, hlm. 25.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

siswi dengan pendidikan umum guna mempersiapkan mereka menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang terampil dan berdaya dalam masyarakat. Kurikulum yang diajarkan mencakup bahasa Belanda, berhitung, menulis, menggambar, geografi, sejarah, fisika, biologi, membatik, memasak, mencuci, ekonomi rumah tangga, ilmu kesehatan, perawatan anak, dan pertolongan pertama. Selain itu, siswa juga memperoleh pelatihan tari dari Gusti Kanjeng Ratu Timur di Astana Praja Mangkunegaran. Pelayanan kesehatan umum diberikan secara cuma-cuma, sedangkan perawatan oleh dokter spesialis dikenakan biaya tertentu.¹⁵ Sisworini Sekolah Kelas II (*Tweede Klasse School*) menjadi Sekolah Kursus Kerumahtanggaan (*Sisworini Huishoudschool*).

Sisworini Sekolah Kelas II (*Tweede Klasse School*) menjadi Sekolah Kursus Kerumah Tanggaan (*Sisworini Huisboudschool*)

Sekolah Sisworini didirikan pada masa Mangkunegara VI pada tahun 1912, dan mengalami sejumlah perubahan di bawah pemerintahan Mangkunegara VII. Pada awalnya, sekolah ini dikenal dengan nama *Pawulangan Bocah Wadon*, dengan lama pendidikan selama tujuh tahun. Tenaga pengajar berasal dari kalangan Barat maupun pribumi yang memenuhi kualifikasi sebagai pendidik. Meskipun awalnya diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan *Sentono* dan *Abdi Dalem* Mangkunegaran, sekolah ini juga menerima siswa dari luar golongan tersebut, selama memenuhi syarat, seperti bebas dari penyakit menular dan telah menjalani imunisasi cacar. Pendidikan di Sekolah Sisworini menekankan keterampilan kerumahtanggaan seperti memasak, pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan, dan menjahit, disertai dengan pendidikan umum seperti membaca, menulis, dan berhitung.¹⁶ Namun, jika dibandingkan dengan *Solosche Van Deventer School*, kualitas pengajaran dan kurikulum di Sisworini dinilai masih berada di bawah standar, baik dari segi metode maupun isi pembelajaran. Sekolah *Solosche Van Deventer School* mendapat prioritas lebih tinggi dari Mangkunegara VII, sehingga memperoleh fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan Sekolah Sisworini.¹⁷

HIS Siswo (*Hollandsch Inlandsche School*) merupakan pengembangan dari Sekolah Siswo atau Sekolah Angka Satu

HIS Siswo merupakan bentuk pengembangan dari Sekolah Siswo atau Sekolah Angka Satu, yang sebelumnya menjadi sekolah modern pertama di Mangkunegaran dengan sistem pendidikan Barat. Transformasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Mangkunegara VII sebagai respons terhadap ketertinggalan Sekolah Angka Satu dibandingkan dengan *Europeesche Lagere School* (ELS), yang

¹⁵ *Prospectus Solosche Van Deventerschool Vitgaande van de Solosche Van Deventer-Veteniging*. Arsip MN No.791.

¹⁶ *Rijksblaad Mangkunegaran no. 33, tahun 1917*.

¹⁷ *Rospectus Solosche Van Deventerschool Vitgaande van de Solosche Van Deventer-Veteniging*.

lebih dahulu berdiri dan telah memberikan pelatihan yang memadai bagi siswa untuk mengikuti ujian pegawai rendahan (*Klein Ambtenarenexamen*). Pembentukan HIS Siswo membuka peluang lebih besar bagi para siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kolonial yang lebih tinggi, seperti MULO dan AMS. Hal ini berbeda dengan Sekolah Angka Satu yang sebelumnya belum memenuhi syarat kurikulum untuk akses ke pendidikan lanjutan tersebut.¹⁸

Pelaksanaan HIS Mangkunegaran mengikuti ketentuan *standardschool* sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1914 No. 359, yang menetapkan kriteria sosial tertentu bagi calon peserta didik. Pendaftaran ke HIS diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan bangsawan (Golongan A), pejabat, dan pengusaha; keturunan orang tua lulusan MULO atau *Kweekschool* ke atas (Golongan B); serta anak dari pegawai rendahan, penguasa lokal, militer, petani, nelayan, atau orang tua yang pernah mengenyam pendidikan di HIS (Golongan C).¹⁹

Meningkatnya popularitas HIS Siswo menyebabkan lonjakan jumlah pendaftar, sehingga gedung lama di kawasan Mangkunegaran tidak lagi memadai. Pada tahun 1920, gedung baru pun dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Selain itu, Mangkunegara VII mengajukan izin kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan HIS di daerah Wonogiri.²⁰ Namun, sekolah tersebut akhirnya dibangun secara langsung oleh pemerintah kolonial dan dibiayai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, di wilayah Mangkunegaran terdapat dua HIS, yakni HIS Siswo yang didirikan oleh Praja dan HIS Wonogiri yang didirikan oleh pemerintah kolonial.²¹

Sekolah Modern di Praja Mangkunegaran berbasis pendidikan Islam yaitu HIS Muhammadiyah Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, seiring dengan berkembangnya Politik Etis di Hindia Belanda. Organisasi ini merespons perubahan zaman dengan mendirikan sekolah-sekolah modern berbasis pendidikan Islam. Awalnya, izin operasional Muhammadiyah dibatasi hanya untuk wilayah Yogyakarta oleh pemerintah kolonial. Namun, untuk mengatasi pembatasan tersebut, ekspansi ke luar daerah tetap dilakukan melalui penggunaan nama lain, seperti pendirian SATV (*Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah*) di Surakarta.²²

¹⁸ Guntur Arie Wibowo, "Pendidikan dan Perubahan Sosial di Mangkunegaran Surakarta 1912-1940", *Jurnal Agasty* Vol. 1 No.2 (2011): hlm. 226-228. <http://e-journal.ikipggrimiadiun.ac.id/index.php/JA/article/view/78>.

¹⁹ *Statblaad tahun 1914 no. 359*.

²⁰ Josowidagdo, "*Seri Padoeka Kg.Gt.Pang.Ad.Ar. Mangkoe Nagoro VII dengan Pendidikan Kanak-kanak Rakyat*", *Het Triwindoe-Gedenkboek*, hlm. 178.

²¹ Wasino, "Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran (1900-1945)", *Laporan Penelitian*. Semarang, hlm. 26.

²² Zarro, M., Yunani., Dhita, A.N., "Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan". *FACTUM: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. 3 No.1 (2019): hlm. 63. <https://doi.org/10.17509/factum.v9i1.21503>.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

Hadirnya SATV di Surakarta dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat untuk mempelajari agama Islam secara lebih teratur dan mendalam serta mengaitkannya dengan masalah sosial yang dihadapi. Sebelum transformasi menjadi Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1922, SATV pada tahun 1920 telah mendirikan sekolah modern Islam bernama *HIS Met Quran Mangkunegaran*, yang awalnya menyewa gedung dan memiliki sekitar 220 siswa pada tahun 1930. Sekolah ini kemudian berkembang dan mengalami transformasi menjadi HIS Muhammadiyah Mangkunegaran pada tahun 1935.²³

Transformasi HIS Muhammadiyah Mangkunegaran menghadirkan citra pendidikan Islam modern di Surakarta dengan adopsi metode Barat, menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sekaligus mengajarkan ajaran Islam. Hal ini menarik siswa dari berbagai lapisan masyarakat. Menyikapi antusiasme tersebut, Mangkunegara VII, yang sangat memperhatikan pendidikan rakyat, mewakafkan sebidang tanah seluas sekitar 2.000 m² di samping Masjid *Alwustho* Mangkunegaran untuk pengembangan sekolah tersebut.²⁴

Lahirnya Program Studiefonds di Nusantara

Tanpa disadari, munculnya Politik Etis pada awal abad ke-20 mendorong proses modernisasi di Hindia Belanda, terutama di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang mengadopsi sistem pendidikan Barat mulai bermunculan, tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan. Peminatnya terus meningkat karena pendidikan bergaya Barat dianggap sebagai kunci untuk memasuki struktur pemerintahan kolonial yang terpusat secara politis. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin besar pula peluang untuk mendekat ke pusat kekuasaan serta memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga pendidikan modern dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan status sosial.²⁵

Perkembangan pendidikan turut mendorong lahirnya program bantuan keuangan bagi anak-anak pribumi yang ingin melanjutkan studi namun menghadapi keterbatasan ekonomi. Program ini dikenal dengan nama *Studiefonds*.²⁶ Program *Studiefonds* telah lama dikenal dan diterapkan di Belanda, antara lain melalui *Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche Studenten in Nederland* yang didirikan di Amsterdam pada tahun 1880,²⁷ serta *Philologisch Studiefonds* yang didirikan di Utrecht pada tahun 1897. Dana studi filologis ini ditujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan

²³ Mohammad Ali, "Perkembangan Sekolah Muhammadiyah di Surakarta pada Tahun 1920-1970", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15. No. 02 (2019): hlm. 304-306. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0107.302-327>.

²⁴ Mohammad Ali, hlm. 310 -316.

²⁵ Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 39-40.

²⁶ N. Kusters, *Handboek voor philanthropisch en maatschappelijk werk in Ned. Oost en West Indie*. (Soerabaja: N.V Koninklijke Boekhandel En Drukkerijen G. KOLFF, 1932), hlm. 244.

²⁷ Gerrit Besselaar, *Zuid-Afrika in de Letterkunde* (Amsterdam: Holl-Afrik Uitgevers-Mij, 1914), hlm. 231.

penelitian di Roma, Athena, dan wilayah Mediterania sebagai bagian dari penyelesaian studi mereka.²⁸

Pembentukan program *Studiefonds* di Hindia Belanda kemungkinan terinspirasi dari praktik serupa di Belanda sebagai bentuk adopsi nilai positif. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan pendidikan bagi kalangan yang kurang mampu. Salah satu pelopor program ini adalah organisasi Budi Utomo, yang didirikan berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, dengan tekad mendirikan perkumpulan dana studi bagi pelajar pribumi. Gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo mengenai dana bantuan *Studiefonds* terealisasi saat Pangeran Ario Noto Dirodjo memimpin Budi Utomo. Di bawah kepemimpinannya, upaya pengembangan intelektual melalui organisasi ini dijalankan dengan lebih kuat dan luas. Dalam pidatonya, Dwijo Sewojo menyatakan bahwa meskipun awalnya Budi Utomo kurang mendapat dukungan dari tokoh-tokoh besar Jawa dan Yogyakarta, Pangeran Ario berhasil menjalin kerja sama dengan kalangan elite, antara lain melalui pendirian *Neutraal Onderwijs* dan *Studiefonds Darmo-Woro*. Salah satu gagasan utama Dr. Wahidin pun terwujud melalui alokasi dana studi awal sebesar f 50.000.²⁹

Dukungan Praja Mangkunegaran Terhadap Pendidikan Lewat Program *Studiefonds*

Kemunculan *Studiefonds* di wilayah Praja Mangkunegaran pada tahun 1912 merupakan manifestasi dari komitmen Mangkunegara VI dalam bidang pendidikan, sebagai bagian dari implementasi Politik Etis. Lembaga ini bertujuan untuk memfasilitasi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi namun mengalami keterbatasan ekonomi. Sebagai anggota organisasi Budi Utomo, Mangkunegara VI berperan aktif dalam mendorong reformasi pendidikan di wilayah kekuasaannya melalui pendirian sekolah dan pembaharuan kurikulum. Inisiatif pendirian *Studiefonds* merupakan hasil kolaborasi antara Mangkunegara VI dengan Residen Surakarta pada masa itu, G.F. van Wijk, yang dikenal memiliki pemikiran progresif terhadap pengembangan sumber daya manusia pribumi. Awalnya, lembaga ini beroperasi berdasarkan regulasi sementara, kemudian diperkuat dengan regulasi permanen sebagaimana tertuang dalam *Pranatan* tanggal 15 Oktober 1913 No. 11/Q, dan secara resmi disahkan melalui Pustaka Praja (*Rijksblad*) No. 20 tahun 1917.³⁰ Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi kalangan tertentu di lingkungan Praja Mangkunegaran, dibentuklah dua jenis lembaga dana pendidikan yang dikenal sebagai *Studiefonds*

²⁸ *Vereeniging Het Philologisch Studiefonds, Statuten Reglement voor het Bestuur, Reglement voor de Stipendiaten* (Utrecht: Den Boer, 1909), hlm. 3.

²⁹ *Soembangsih: Gedenkboek Boedi-Oetomo 1908-20 Mei-1918* (Amsterdam: Tijdschrift Nederl Indie Oud & Nieuw, 1918), hlm. 20.

³⁰ Husodo Pringgokusumo, *Dana Praja Mangkunegaran untuk Beasiswa* (Surakarta: Reksopustoko, 1989), 1 dan *"Het Studiefonds Van Het Mangkoenagorische Rijk", 1924, Djawa Drie Maandelijksch Tijdschrift Orgaan Van Het Java Instituut*, hlm. 66.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

A dan Studiefonds B. Dalam naskah *Rijksblad* No. 20 tahun 1917 menjelaskan tentang *Studiefonds A* yang mendapatkan pertolongan uang yang dipergunakan untuk membiayai pendidikan yaitu:³¹

Putra *Sentana* Mangkunegaran yang berdomisili di dalam wilayah Praja Mangkunegaran. Putra *Sentana* Mangkunegaran yang tinggal di luar wilayah Praja namun masih berada dalam kawasan Karesidenan Surakarta. *Priyayi* dan *opsir* Mangkunegaran, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa *Purnabakti*. Sementara itu, *Studiefonds B* mulai diberlakukan pada tahun 1915, menyusul implementasi awal *Studiefonds A*. Keberadaan *Studiefonds B* dilatarbelakangi oleh mekanisme pengelolaan dana pendidikan, di mana dana pengganti dari lulusan *Studiefonds A* tidak langsung disetorkan ke kas pembendaharaan Praja Mangkunegaran, melainkan dikumpulkan secara terpisah. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung pendidikan bagi siswa berbakat yang tidak memenuhi kriteria penerima *Studiefonds A*, khususnya mereka yang bukan berasal dari kalangan *Sentana*, *perwira*, *opsir*, maupun pegawai negeri di lingkungan Praja Mangkunegaran.³² Pembentukan *Commissie van Advies* berimplikasi pada peningkatan selektivitas dalam pemberian bantuan dana *Studiefonds A dan B* kepada para pelajar yang bermaksud melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mekanisme pemberian dana bantuan ini tidak lagi bersifat sepenuhnya diskresioner, melainkan melalui prosedur yang lebih sistematis dan ketat.

Seleksi awal dilakukan oleh Mangkunegara VII secara langsung, yang hasilnya kemudian dikaji dan dirumuskan dalam bentuk keputusan resmi. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Residen Surakarta untuk dilakukan evaluasi lanjutan serta peninjauan administratif.³³ Dengan diberlakukannya regulasi baru ini, setiap permohonan dana *Studiefonds* harus melalui dua tahapan seleksi dari pihak Mangkunegaran dan Residen. Pada masa pemerintahan Mangkunegara VII, dibentuk sebuah komisi khusus bernama *Commissie van Advies* pada tahun 1918, yang berfungsi sebagai lembaga penasehat untuk mempermudah proses pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan dana pendidikan dari *Studiefonds* Mangkunegaran. Komisi ini diketuai oleh Patih Gubernur, dengan anggota terdiri dari seorang *Superintendent* yakni pejabat tinggi yang mengawasi perusahaan-perusahaan di bawah otoritas Mangkunegaran dan seorang Mayor dari Legiun Mangkunegaran. Selain itu, *Commissie van Advies* juga dibantu oleh seorang *Kawedanan Nitiworo* dari kantor *Hamong Praja* yang bertugas mengawasi urusan pendidikan dan sekolah di

³¹ *Rijksblad Mangkoenegaran Tahun 1917 No 20*, hlm. 141.

³² Panoedjoe Roewio Darmo Broto, *Een en Ander Over Het Mangkoenagorische Rijksstudiefonds, Het Triwindoe-Gedenboek Mangoe Nagoro VII* (Surakarta: Comite voor het Triwindoe-Gedenkboek, 1939), hlm. 234.

³³ Husodo Pringgokusumo, *Dana Praja Mangkunegaran untuk Beasiswa* (Surakarta: Reksopustoko, 1989), hlm. 1.

wilayah Mangkunegaran. Pejabat ini sekaligus menjabat sebagai sekretaris komisi dan memimpin urusan administrasi.³⁴

Pada tahun 1919, Mangkunegara VII menginisiasi pendirian *Studiefonds* baru yang dinamakan *Studiefonds Kas Daleman*. Dana ini bersumber langsung dari kas pribadi Mangkunegara dan ditujukan khusus untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Berbeda dengan *Studiefonds* sebelumnya, dana ini tidak dikelola oleh *Commissie van Advies*, melainkan langsung oleh pihak Mangkunegaran dengan dukungan dari *Kabupaten Mandrapura*.³⁵ Dengan demikian, sejak masa Mangkunegara VI hingga Mangkunegara VII, terdapat tiga jenis *Studiefonds*, yaitu *Studiefonds A dan B* pada masa Mangkunegara VI, serta *Kas Daleman* pada masa Mangkunegara VII.

Besaran Tarif Umum yang Diberikan Oleh *Commissie van Advies*

Sebelum terbentuknya *Commissie van Advies*, pemberian dan besaran dana *Studiefonds* didasarkan pada laporan gaji orang tua siswa serta penyelidikan penghasilan tambahan, yang dianggap memberatkan masyarakat. Pada tahun 1919, *Commissie van Advies* mengadakan rapat untuk mereformasi kebijakan tersebut dengan mengusulkan tarif umum besaran dana yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa. Akibatnya, mekanisme penyelidikan penghasilan dan laporan gaji orang tua dihapuskan, termasuk pemberian dana kepada siswa yang menempuh studi malam, karena mereka dinilai mampu mencari penghasilan di siang hari. Tarif umum pemberian dana *Studiefonds* ini kemudian ditetapkan secara resmi oleh *Commissie van Advies* sebagai berikut.³⁶

Table.1. Penetapan tarif umum pemberian dana *Studiefonds* oleh *Commissie van Advies*

Nama Sekolah	Dana perbulan	Nama Sekolah	Dana Perbulan
OSVIA	f 30,-	OSVIR	f 50,-
<i>Techniche School</i> Kota Surabaya, Semarang Dan Batavia	f 45,-	<i>Techniche School</i> Kota Yogyakarta	f 40,-
<i>Hogere Burger School</i>	f 50,-	<i>Algemene Middelbare School</i>	f 40,-
MULO (apabila orang tuanya tinggal di kota)	f 10,-	MULO (apabila orang tuanya tinggal di luar kota)	f 20,-
STOVIA	f 50,-	<i>Hogere Kweek-School</i> Kota Purworejo	f 12.5,-
<i>Burgerlijke Avond School</i> Kota Surabaya	f 45,-	<i>Technische Hoge-School</i> Kota Bandung	f 105,-

³⁴ *Rijksblad Mangkoenegaran* Tahun 1917 No. 20, hlm. 141.

³⁵ Josowidagdo, "Sri Padoeka Kg.Gt.Pang.Ad.Ar. Mangkoe Nagoro VII dengan Pendidikan Kanak-kanak Rakyat", *Het Triwindoe-Gedenkboek*, hlm. 180.

³⁶ Husodo Pringgokusumo, *Dana Praja Mangkunegaran untuk Beasiswa* (Surakarta: Reksopustoko, 1989), hlm. 2-3.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

<i>Middelbare Landbouw School</i> Kota Buitenzorg/ Bogor	<i>f 40,-</i>	<i>Hogore Landbouw School</i> Kota Wegwnigen Negeri Belanda	<i>f 1.400,-</i>
---	---------------	--	------------------

Sumber: Husodo Pringgokusumo, *Dana Praja Mangkunegaran untuk Beasiswa* (Surakarta:Reksopustoko, 1989)

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh *Commissie van Advies*, penerima *Studiefonds* diwajibkan melakukan pengembalian dana secara bulanan sebesar 20% dari penghasilan jika gaji bulanannya melebihi *f 50,-*. Namun, apabila penerima mengalami kesulitan finansial, mereka dapat mengajukan permohonan keringanan cicilan melalui surat resmi kepada *Commissie van Advies* disertai alasan yang sah. Setelah permohonan disetujui, besaran cicilan dapat dikurangi. Khusus bagi penerima yang bekerja di lingkungan pemerintahan Praja Mangkunegaran, tarif pengembalian diturunkan menjadi 5%, sedangkan bagi yang bekerja di luar pemerintahan ditetapkan sebesar 10%.

Pengembalian dana *Studiefonds* disetorkan kepada Bupati-Patih dan kemudian disimpan dalam lembaga perbankan. Dana ini dikumpulkan untuk digunakan kembali dalam mendukung pendidikan bagi siswa yang berhak menerima bantuan, khususnya dari kalangan non-bangsawan melalui *Studiefonds B*, guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Selain itu, bunga yang diperoleh dari simpanan bank dimanfaatkan untuk menutupi biaya administrasi, termasuk pembayaran gaji pengelola administrasi *Studiefonds* sebesar *f 10,-* per bulan.³⁷

Pengelolaan dana *Studiefonds* yang mempertimbangkan keberlanjutan serta perluasan akses bagi siswa non-*Sentono* menjadikan dana *Studiefonds B* bersumber dari pengembalian yang dilakukan oleh penerima *Studiefonds A*. Kebijakan ini mendorong peningkatan signifikan jumlah pendaftar, khususnya pada *Studiefonds B*. Pada periode 1915–1930, pengurus administrasi mencatat dan mengumumkan secara resmi besaran dana *Studiefonds* yang diterima oleh para siswa.³⁸

Table 2. Rekapitulasi penerimaan dana *Studiefonds* tahun 1915-1930

Tahun	Diterima	Tahun	Diterima
1915	<i>f 320</i>	1923	<i>f 3.538.50</i>
1916	<i>f 642.50</i>	1924	<i>f 2.317.75</i>
1917	<i>f 493.50</i>	1925	<i>f 3.658.75</i>
1918	<i>f 307</i>	1926	<i>f 5.778.30</i>

³⁷ Husodo Pringgokusumo, hlm. 3.

³⁸ Sarwoko Mangoenkoesoemo, *Verslag van het Mangkoenagorische Studiefonds over het Boekjaar 1930* (Mangkoenegaran: t.p, 1931), hlm. 6.

1919	<i>f 1.899.50</i>	1927	<i>f 6.720.60</i>
1920	<i>f 2.061</i>	1928	<i>f 6.426.41+3.000</i>
1921	<i>f 3.128.75</i>	1929	<i>f 6.093.03</i>
1922	<i>f 3.659</i>	1930	<i>f 6.497.60</i>
Total : <i>f 56.531.19</i>			

Sumber: Sarwoko Mangoenkoesoemo, *Verlag van het Mangkoenagrosche Studiefonds over het Boekjaar 1930*, (Mangkoenegaran: t.p., 1931)

Sementara itu, pengeluaran dana *Studiefonds* yang dikelola oleh Praja Mangkunegaran sejak awal Pendiannya pada tahun 1912 hingga tahun 1923 tercatat sebagai berikut:³⁹

Table 3. Realisasi anggaran dana *Studiefonds* Mangkunegaran pada tahun 1912-1923

Tahun	Diterima	Tahun	Diterima
1912	<i>f 2.190</i>	1918	<i>f 16.298</i>
1913	<i>f 3.130</i>	1919	<i>f 16.367</i>
1914	<i>f 3.870.95</i>	1920	<i>f 17.724</i>
1915	<i>f 6.405.90</i>	1921	<i>f 20.587</i>
1916	<i>f 11.857.90</i>	1922	<i>f 23.626.80</i>
1917	<i>f 14.405.10</i>	1923	<i>f 25.626.06</i>

Sumber: Husodo Pringgokusumo, *Dana Praja Mangkunegaran untuk Beasiswa* (Surakarta: Reksopustoko, 1989)

Syarat Untuk Mendapatkan *Studiefonds* Mangkunegaran

Pada tahun 1912, sebagai awal pelaksanaan *Studiefonds* di Praja Mangkunegaran, bantuan pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan putra *Sentono*, *opsir*, dan *priyayi*, sebagaimana diatur dalam *Rijksblad Mangkunegaran* No. 20 Tahun 1917. Syarat utama untuk memperoleh bantuan ini adalah dengan mengajukan surat permohonan melalui perantara abdi dalem Praja Mangkunegaran. Surat permohonan tersebut memuat beberapa ketentuan administratif sebagai berikut:

³⁹ Husodo Pringgokusumo, *Dana Praja Mangkunegaran untuk Beasiswa*, hlm. 4.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

1. Nama Orang tua	9. Surat dari kepala sekolah yang menyatakan rencana bab kualitas anak tersebut yang ingin melanjutkan studinya, rajinnya, sikap dan lainnya, itu serta apakah kecerdasannya cukup atau tidak dengan semaksimal mungkin mengumpulkan laporan pengajaran (<i>School Rapport</i>).
2. Menyebutkan hubungan keluarga seperti dari Istri, anak, cucu, buyut, canggah di Praja Mangkunegaran.	10. Biaya anak tersebut belajar di sekolah sebelumnya.
3. Pendapatan (termasuk belanja) orang tua.	11. Biaya asrama anak tersebut.
4. Pekerjaan bapaknya	12. Biaya lain-lain.
5. Nama anaknya.	13. Seberapa kuatkah orangtua dari siswa yang bersangkutan tentang nomor 10, 11, dan 12.
6. Umur anaknya	
7. Anak tadi menjadi murid di sekolah <i>Holland</i> , Jawa atau sekolah lain serta berapa lama anak tersebut telah belajar disekolah tersebut.	
8. Laporan anak yang bersangkutan akan melanjutkan sekolah dimana.	

Setelah surat permohonan memenuhi syarat administratif, dilakukan verifikasi lanjutan sebelum disetujui oleh Mangkunegara VI dengan persetujuan Residen Surakarta. Apabila permohonan diterima, orang tua atau siswa yang bersangkutan akan menerima surat keputusan resmi yang memuat informasi mengenai besaran dana *Studiefonds* yang diberikan serta waktu atau hari penyalurannya oleh pihak Mangkunegaran.⁴⁰

Selain diperuntukkan bagi kalangan *Sentono*, *priyayi*, dan *opsir*, *Studiefonds* juga disediakan bagi masyarakat umum di luar golongan tersebut. Namun, calon penerima tetap diwajibkan memenuhi persyaratan umum dan pengajuannya harus ditanggung serta dimohonkan oleh seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan Praja Mangkunegaran. Selain itu, siswa juga diwajibkan melampirkan dokumen persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan *Studiefonds*, antara lain:⁴¹

1. Surat permohonan dari orang tua siswa yang ditujukan untuk memperoleh bantuan *Studiefonds*;
2. Laporan hasil belajar (*school rapport*) dari siswa yang bersangkutan;
3. Surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa siswa tersebut terdaftar secara resmi Sebagai murid di sekolah terkait.

Lonjakan jumlah pendaftar *Studiefonds* mendorong dilakukannya pembaruan persyaratan administratif pada tahun 1924 dan 1925. Dalam pembaruan tersebut, mekanisme permohonan diperketat, termasuk penegasan bahwa siswa dari keluarga mampu diwajibkan membiayai

⁴⁰ *Rijksblad Mangkoenegaran Tahun 1917 No. 20*, hlm. 141-142.

⁴¹ *Berkas-berkas permohonan studiefonds*, Arsip Mangkunegaran No. A.676.

pendidikannya secara mandiri. Ketentuan ini ditegaskan dalam sejumlah peraturan resmi, di antaranya:⁴²

1. Keterangan buat ongkos makan dan mondok dari yang dipondoki oleh direktur sekolahannya.
2. Yang turut menanggung ini mesti diambil dari *sentono*, *opsir* dan *priyai* yang orang tuanya mendapatkan anggaran belanja dari kas Praja atau dari kas Legiun Mangkunegaran, dan mesti diambil dari seorang yang umurnya kurang dari 60 tahun.
3. Dalam surat permohonan harus dilampiri surat keterangan, berapa banyak anaknya bapa dan *voogd* yang mempunyai surat permohonan tersebut, berapa yang sudah tidak diperlindungi hidupnya dan Berapa yang belum sekolah dan harus diterangkan dimana alamat tempat sekolah itu.

Memasuki tahun 1925, kebijakan Pendidikan tersebut berevolusi menjadi lebih terstruktur melalui pengenalan konsep partisipasi biaya berdasarkan strata penghasilan. Disinilah letak rasionalisasi subsidi Pendidikan yang diterapkan oleh Mangkunegaran. Pemerintah tidak Lagi memberikan bantuan penuh secara merata, melainkan menerapkan system kontribusi progresif bagi orang tua atau *voogd* (Wali).

Penerapan aturan baru yang dimulai pada tahun 1924 menitik beratkan pada verifikasi administratif yang lebih ketat. Setiap permohonan bantuan wajib disertai dengan rincian biaya hidup yang akurat, mencakup ongkos makan serta biaya asrama yang telah diverifikasi oleh pemimpin institusi pendidikan. Selain itu, tanggung jawab pembiayaan tidak hanya diletakan pada pundak orang tua biologis namun juga melibatkan peran *voogd* (Wali) resmi. Hal ini bertujuan untuk setiap anak memiliki penanggung jawab yang sah secara hukum dan finansial, terutama bagi mereka yang orang tuanya telah mencapai usia senja atau berada di luar struktur aktif birokrasi.

Inti dari reformasi pendidikan ini terletak pada mekanisme “Urunan” atau partisipasi biaya sekolah yang bersifat progresif. Pemerintah menerapkan bahwa besaran kontribusi wali murid terhadap biaya pendidikan anak berbanding lurus dengan pendapatan bulanan mereka. Golongan dengan penghasilan tinggi, yakni diatas f500 per bulan, memikul beban terbesar dengan kewajiban menanggung hingga 30% dari total biaya sekolah anak. Pertama. Sebaliknya, bagi keluarga dengan

⁴² Tweede Jaaverslag dari Mangkoenegarasche Studiefonds diperiksa sampai penghabisan tahun 1924, No. A.645.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

penghasilan yang lebih rendah, pemerintah memberikan kelonggaran melalui persentase kontribusi yang jauh lebih kecil, bahkan mencapai angka 2,5% bagi mereka yang berpenghasilan minimum.⁴³

Struktur pembiayaan ini juga dirancang dengan mempertimbangkan jumlah anak dalam satu keluarga. Terdapat gradasi persentase yang menurun untuk anak kedua, ketiga, hingga kelima, yang menunjukkan pemahaman pemerintah terhadap beban kumulatif ekonomi rumah tangga. Dengan adanya sistem ini maka, beban biaya tidak lagi bertumpu sepenuhnya oleh Praja Mangkunegaran, melainkan didistribusikan secara kolektif antara pemerintah dan orang tua. Anak-anak dari keluarga yang lebih mapan secara ekonomi diharapkan menjadi penopang bagi keberlanjutan dana belajar, sehingga alokasi subsidi dapat difokuskan untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Pada tahun 1930, *Commissie Studiefonds* melakukan evaluasi mendalam yang berujung pada perubahan fundamental dalam regulasi bantuan pendidikan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika anggaran dan kebutuhan untuk memperluas jangkauan bantuan secara lebih merata. Dalam keputusan terbaru tersebut, otoritas menetapkan pembatasan yang ketat mengenai jumlah anak yang dapat ditanggung oleh satu orang tua atau *voogd*. Bagi golongan *Sentono*, *Opsir*, dan *Priyai*, jumlah anak yang berhak mendapatkan tunjangan dibatasi hanya untuk dua orang anak. Hal ini mencerminkan upaya sistematis pemerintah dalam melakukan rasionalisasi kuota agar akses Pendidikan tidak terkonsentrasi pada keluarga tertentu saja.⁴⁴

Selain penetapan kuota, aspek moral dan tanggung jawab finansial pasca-pendidikan menjadi fokus utama dalam kebijakan tahun 1930. *Commissie* memperkenalkan sebuah sistem kepercayaan yang berlandaskan pada integritas para siswa dan alumni penerima *Studiefonds*. Terdapat ekspektasi kolektif bahwa para alumni yang berhasil menyelesaikan pendidikannya dan memiliki kemandirian ekonomi, memiliki kewajiban moral untuk mengembalikan dana yang telah mereka terima. Pengembalian dana ini tidak bersifat memaksa secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kapasitas kemampuan finansial masing-masing individu setelah mereka terjun ke dunia kerja.⁴⁵

⁴³ Hal Pertolongan Studiefond, Petikan dari Konsep Pranatan Baharoe ketika pada 27 September 1925. Arsip No. A.555.

⁴⁴ Agenda yang akan direboek dalam conferents leden commissie Studiefonds Mangkunegaran tertanda pada Hari djoeni 1930, Arsip No. A.643.

⁴⁵ Sarwoko Mangoenkoesoemo, *Verslag van het Mangkoenagorische Studiefonds over het Boekjaar 1930*, hlm. 10-12.

Meskipun sistem ini berbasis pada kepercayaan, *Commissie* tetap menjalankan fungsi pengawasan administratif untuk menjaga keberlangsungan siklus dana tersebut. Bagi para mantan siswa yang belum memenuhi komitmen pengembalian dana, *Commissie* menjalankan prosedur formal melalui pengiriman surat pemberitahuan. Langkah ini diambil bukan untuk sekedar sebagian penagihan administratif, melainkan sebagai pengingat akan kontrak sosial yang telah disepakati sejak awal pemberian dana *Studiefonds*. Pihak *Commissie* berupaya menyentuh kesadaran moral para mantan siswa melalui surat edaran, di dalam surat tersebut, ditegaskan kembali mengenai tanggung jawab penerima bantuan dengan isi surat sebagai berikut:⁴⁶

Atas permintaan orangtua atau wali anda, anda diberikan beasiswa untuk Pendidikan sekolah oleh Studiefonds Mangkunegaran dengan ketentuan bahwa, setelah anda menerima penghasilan sebesar f50,- perbulan atau lebih, jumlah yang wajib anda kembalikan ke Studiefonds dengan. Pengembalian sebesar 20% dari penghasilan yang anda peroleh. Sekarang Akan menjadi jelas bagi anda, bahwa setelah anda beranjak dewasa, bahwa aturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan kepada siswa lain agar juga mendapatkan dana Studiefonds sehingga dana yang diperoleh siswa baru diperoleh dari pengembalian dana seperti anda. Oleh karena itu jumlah yang dibayarkan untuk Pendidikan anda dan uang muka yang diberikan kepada anda dimaksudkan untuk digunakan secara bergilir, sehingga jumlah orang yang tidak terbatas dapat memperoleh pendidikan dengan dana yang sama.

Jika anda tidak memenuhi kewajiban anda terhadap dana Studiefonds, anda tidak membuat Pendidikan bagi satu orang bagi sejumlah besar orang menjadi mustahil mendapatkan Studiefonds.

Oleh karena itu, Commissie Studiefonds sangat sedih dan sangat terkejut dengan keyakinan bahwa, meskipun anda sekarang memegang posisi yang sangat baik di masyarakat, anda memiliki hutang atas beasiswa yang diberikan kepada anda, anda tetap tidak memenuhi peraturan dan kewajiban anda terhadap Studiefonds dan oleh karena itu mengganggu pekerjaan-pekerjaan pembuatan dana tersebut mustahil. Bayangkan saja perasaan apa yang akan anda rasakan terhadap mantan siswa yang tidak membayar jika atas permintaan beasiswa, anda harus diberitahu bahwa anda tidak dapat memperoleh dana pertolongan untuk studi dikarenakan pendahulu anda tidak memenuhi kewajibannya. Kasus itu kini terjadi berulang kali. Dana studi harus berulang kali menolak permohonan untuk menerima beasiswa karena anda dan beberapa orang lain yang bersama anda tidak memenuhi kewajiban anda. Dewan percaya bahwa setelah penjelasan diatas anda akan sampai pada waktunya secara moral anda terdorong untuk memenuhi kewajiban anda terhadap Studiefonds Mangkunegaran dan bahwa dimasa depan pembayaran anda akan diterima secara teratur.

Melalui kutipan surat edaran tersebut, terlihat bahwa *Commissie Studiefonds* tidak hanya menekankan aspek kewajiban moral, tetapi juga menunjukkan sikap adatif terhadap kondisi ekonomi para alumninya. Keputusan *Commissie van Advies* menunjukkan strategi keberlanjutan lembaga. Dengan prinsip lebih baik menerima sekecil apapun dari. Pada tidak menerima sama sekali. Lembaga ini berusaha menjaga likuiditas dana agar tetap mampu membiayai generasi siswa berikutnya, sekaligus mengurangi beban finansial alumni yang merasa keberatan dengan tarif awal

⁴⁶ Sarwoko Mangoenkoesoemo, hlm. 12.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

20%. Hal. ini dibuktikan bahwa dengan adanya klasifikasi ulang persentase pengembalian dana yang disesuaikan dengan instansi tempat alumni bekerja. Kebijakan penurunan tarif pengembalian dari 20% menjadi 5% bagi pegawai Praja Mangkunegaran dan 10% bagi mereka yang bekerja di luar lingkungan tersebut, mencerminkan upaya pragmatis lembaga agar sirkulasi dana bantuan pendidikan tetap berjalan meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.⁴⁷

Keputusan *Commisie van Advies* menunjukkan strategi keberlanjutan lembaga. Dengan prinsip lebih baik menerima sekecil apapun dari. Pada tidak menerima sama sekali. Lembaga in berusaha menjaga likuiditas dana agar tetap mampu membiayai generasi siswa berikutnya, sekaligus mengurangi beban finansial alumni yang merasa keberatan dengan tarif awal 20%.

Dalam korespondensi resminya, *Commisie* menekankan kembali bahwa pemberian bantuan pendidikan tersebut didasarkan atas permohonan tulus dari orang tua atau *voogd* demi masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pengembalian dana dipandang sebagian sebuah bentuk estafet tanggung jawab, dana yang dikembalikan oleh para alumni akan diputar kembali untuk membiayai generasi penerus yang sedang menempuh pendidikan. Dengan demikian, *Studiefonds* bertransformasi menjadi sebuah sistem dana bergulir yang mandiri, di mana keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan *Commissie Studiefonds* dan integritas para alumni atau penerima manfaatnya.

Hasil Pendidikan Siswa yang Mendapatkan *Studiefonds* Mangkunegaran Tahun 1912-1944

Dapat dilihat dari Data diatas menunjukkan adanya peningkatan dalam penerimaan dana *Studiefonds* dari para lulusan serta peningkatan jumlah dana yang disalurkan kepada siswa penerima bantuan. Dewan pengelola berhasil memenuhi sebagian besar permohonan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, tidak seluruh permohonan dapat disetujui, karena terdapat sejumlah mantan penerima *Studiefonds* yang belum memenuhi kewajiban pengembalian dana, sehingga memengaruhi kapasitas dana yang tersedia. Berikut ini merupakan data jumlah siswa penerima *Studiefonds A* yang melanjutkan pendidikan mereka sejak awal pembentukan lembaga tersebut, yakni dari tahun 1912 hingga 1930.⁴⁸

⁴⁷ Sarwoko Mangoenkoesoemo, hlm. 12.

⁴⁸ Sarwoko Mangoenkoesoemo, *Verslag van het Mangkoenagorische Studiefonds over het Boekjaar 1930*, hlm. 7.

Table 4. Status Pendidikan dan perolehan ijazah siswa penerima *Studiefonds*

Sekolah (Negeri Belanda)	Jumlah Siswa	Ijazah yang diperoleh	Siswa yang tidak mendapatkan ijazah	Siswa yang masih belajar
<i>Med. Hooge School</i>	1	1	-	-
<i>Technische Hooge School</i>	1	1	-	-
<i>Landbouw Hooge School</i>	1	1	-	-
<i>Universiteit Leiden</i>	1	-	-	1
<i>Gem. Universiteit Amsterdam</i>	1	-	-	1
Jumlah	5	3	0	2

Table 5. Status Pendidikan dan perolehan ijazah siswa penerima *Studiefonds* di Sekolah HIndia Belanda

Sekolah (Hindia Belanda)	Jumlah Siswa	Ijazah yang diperoleh	Siswa yang tidak mendapatkan ijazah	Siswa yang masih belajar
<i>Ambachtscholen</i>	19	12	7	-
H.B.S	5	2	3	-
B.A.S.	10	9	1	-
<i>Boekhoudcursus</i>	1	1	-	-
<i>Osvia (Mosviba)</i>	28	21	5	2
<i>Kon. Wilh School</i>	6	4	2	-
OSVIR	3	2	1	-
<i>Suikercursus</i>	2	2	-	-
<i>Technische Avondschoon</i>	12	5	7	-
<i>Kweekschool</i>	6	-	6	-
<i>P.J.S (Techn. School)</i>	27	14	8	5
<i>Middelbare Landb. School</i>	7	3	2	2
<i>Technische Hooge School</i>	2	1	-	1
<i>Koningin Emma School</i>	6	5	1	-
MULO	97	7	30	60
<i>Handelschool</i>	2	1	1	-
<i>Koepokinrichting</i>	4	4	-	-
STOVIA	2	-	-	2
<i>Gen. Hooge School</i>	4	-	-	4
A.M.S	25	4	3	18
N.I.A.S	2	-	2	-
<i>Comptabiliteitscursus</i>	1	1	-	-
<i>Cultuurschool</i>	2	1	-	1
<i>Holl. Inl. Kweekschool</i>	8	2	1	5
<i>Van Deventerschool</i>	10	-	3	7
<i>School voor Assist. Apothekers</i>	1	-	-	1
<i>Bestuurschool</i>	1	1	-	-

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

Jumlah	293	102	83	108
---------------	------------	------------	-----------	------------

Sumber: Sarwoko Mangoenkoesoemo, *Verslag van het Mangkoenagorische Studiefonds over het Boekjaar 1930*, (Mangkoenegaran: t.p, 1931)

Berdasarkan data penerima *Studiefonds A* pada periode 1912–1930, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian lembaga ini telah tercapai dengan tingkat keberhasilan sebesar 56%, meskipun persentase tersebut tidak memperhitungkan 110 siswa yang masih melanjutkan studi. Secara rinci, 35% dari penerima *Studiefonds A* berhasil memperoleh ijazah, 28% tidak memperoleh ijazah, dan 37% masih dalam proses belajar. Sementara itu, data mengenai penerima *Studiefonds B* sejak awal pelaksanaannya pada tahun 1915 hingga tahun 1930 adalah sebagai berikut.⁴⁹

Table 6. Data penerima *Studiefonds B* pada sekolah di Negeri Belanda tahun 1915-1930

Sekolah (Negeri Belanda)	Jumlah Siswa	Ijazah yang diperoleh	Siswa yang tidak mendapatkan ijazah	Siswa yang masih belajar
<i>Academie voor Beeldende Kusten</i>	2	-	2	-
<i>Rechts Hooge School</i>	1	1	-	-
Jumlah	3	1	2	0

Table 7. Data penerima *Studiefonds B* pada sekolah di Hindia Belanda tahun 1915-1930

Sekolah (Hindia Belanda)	Jumlah Siswa	Ijazah yang diperoleh	Siswa yang tidak mendapatkan ijazah	Siswa yang masih belajar
MULO	19	1	3	15
H.B.S+A.M.S	6	-	-	6
<i>Kweekschool</i>	3	1	-	2
<i>Mosviba</i>	1	-	-	1
<i>P.J.S. (Techn. School)</i>	2	-	1	1
<i>Holl. Inl. Kweekschool</i>	1	1	-	-
<i>School voor Assistan Apothekers</i>	1	-	-	1
Jumlah	33	3	4	26
Jumlah <i>Studiefonds A</i>	298	105	83	110
Jumlah <i>Studiefonds B</i>	36	4	6	26

Sumber: Sarwoko Mangoenkoesoemo, *Verslag van het Mangkoenagorische Studiefonds over het Boekjaar 1930*, (Mangkoenegaran: t.p, 1931)

⁴⁹ Sarwoko Mangoenkoesoemo, hlm. 8.

Data di atas menunjukkan jumlah penerima *Studiefonds B* pada periode 1915–1930, dengan tingkat pencapaian dana sebesar 40%, tidak termasuk 26 siswa yang masih dalam proses pendidikan. Secara rinci, 11% dari siswa berhasil memperoleh ijazah, 17% tidak memperoleh ijazah, dan 72% masih melanjutkan studi.

Selanjutnya, data dari *Studiefonds A dan B* akan diklasifikasikan berdasarkan jenis sekolah yang diikuti oleh para siswa, dengan hasil sebagai berikut:⁵⁰

Table 8. Pengklasifikasian jenis sekolah dari siswa yang mendapatkan dana *Studiefonds A dan B*

Sekolah (Negeri Hindia Belanda&Negeri Belanda)	Jumlah Siswa	Ijazah yang diperoleh	Siswa yang tidak mendapatkan ijazah	Siswa yang masih belajar
<i>Technische School</i>	82	49	27	6
<i>Technische Hooge Scholen</i>	3	2	-	1
<i>Academie voor Beldende Kusten</i>	2	-	2	-
H.B.S + A.M.S.	36	6	6	24
<i>Geneeskundige Hooge School</i>	6	1	-	5
MULO	116	8	33	75
OSVIA (<i>Mosviba</i>)	29	21	5	3
<i>Kweekscholen</i>	18	4	7	7
<i>Meisjes Scholen</i>	10	-	3	7
<i>Rechtscholen</i>	4	3	1	-
STOVIA	4	-	2	2
<i>Landbouwscholen</i>	8	4	2	2
<i>Cultuurscholen</i>	4	3	-	1
<i>Apothekers School</i>	2	-	-	2
<i>Universiteit Leiden</i>	1	-	-	1
<i>Andere Scholen</i>	9	8	1	-
Jumlah	334	109	89	36

Sumber: Sarwoko Mangoenkoesoemo, *Verlag van het Mangkoenagorische Studiefonds over het Boekjaar 1930*, (Mangkoenegeran: t.p, 1931)

Data gabungan penerima *Studiefonds A dan B* berdasarkan jenis sekolah menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 55%, dengan catatan bahwa persentase tersebut tidak mencakup 136 siswa yang masih dalam proses pendidikan. Dari total penerima, 33% berhasil memperoleh ijazah, 26% tidak memperoleh ijazah, dan 41% masih melanjutkan studi. Temuan ini mencerminkan capaian program *Studiefonds* dalam mendukung akses pendidikan, meskipun masih terdapat proporsi siswa yang belum menyelesaikan pendidikannya.⁵¹

⁵⁰ Sarwoko Mangoenkoesoemo, hlm. 8.

⁵¹ Sarwoko Mangoenkoesoemo, hlm. 10.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

Selain laporan anggaran dari *Studiefonds A dan B*, terdapat pula laporan keuangan *Studiefonds Kas Daleman*, yaitu dana bantuan pendidikan yang berasal dari kas pribadi Mangkunegara dan tidak dikelola oleh *Commissie van Advies*. Pengelolaan dana ini berada langsung di bawah otoritas Praja Mangkunegaran melalui pemerintah Kabupaten Mandrapura. Berikut ini merupakan jumlah dana yang telah dikeluarkan pada periode tahun 1939–1944.⁵²

Table 9. Jumlah dana *Studiefonds* yang telah dikeluarkan pada periode tahun 1939-1944

Tahun	Dana yang dikeluarkan
1929	f 1.273,74
1930	f 360,
1931	f 1389,41
1932	f 60,-
1933	f 1.350,-
1934	f 375,-
1935	f 625,28
1936	f 129,-
1937	f 5.444,08
1938	f 4.356,-
1939	f 3.837,05
1940	f 2.294,01
1941	f 5.249,28
1942	f 8.014,01
1943	f 771,98
1944	f 270,50
-	f 1932,05

Keterangan: (-) "data tidak menunjukkan ditahun berapa dana tersebut dikeluarkan untuk siswa". Sumber: Tjijtjilan Ngatoraken Wangsoel Ampilan Arta Studiefonds Saking Ngarsa Dhalem III 1940-1944, Arsip No. P.2545

Pada masa pendudukan Jepang, anggaran belanja Praja Mangkunegaran mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada awal pendudukan tahun 1942 (2602), anggaran tercatat sebesar f1.529.132, kemudian menurun menjadi f 1.415.673 pada tahun 1943 (2603), dan f 1.411.673 pada tahun 1944 (2604). Meskipun pemberian *Studiefonds* tetap dilanjutkan, penurunan anggaran tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah dana studi yang dapat disalurkan serta menurunnya jumlah siswa yang permohonannya disetujui untuk menerima bantuan *Studiefonds* Mangkunegaran.

Penurunan anggaran Praja Mangkunegaran selama masa pendudukan Jepang berdampak langsung pada sektor pendidikan. Sebagai konsekuensinya, alokasi anggaran pendidikan

⁵² Tjijtjilan Ngatoraken Wangsoel Ampilan Arta Studiefonds Saking Ngarsa Dhalem III 1940-1944, Arsip No. P.254.

mengalami penyusutan signifikan, yakni sebesar *f*112.562 pada tahun 1942, turun menjadi *f*83.743 pada tahun 1943, dan sedikit meningkat menjadi *f*118.808 pada tahun 1944.⁵³

Dalam kondisi penurunan anggaran akibat pendudukan Jepang, sektor pendidikan di Praja Mangkunegaran mengalami berbagai hambatan. Meskipun demikian, pemerintah Praja tetap mempertahankan keberlangsungan *Studiefonds* Mangkunegaran sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan. Pada awal masa pendudukan, tercatat sebanyak 84 siswa menerima bantuan *Studiefonds*.⁵⁴

Table 10. Penerima bantuan *Studiefonds* pada masa pendudukan kolonial Jepang

Sekolah	Jumlah Siswa	Sekolah	Jumlah Siswa
Siswo Rini	12	MOSVIA	8
<i>Van Deventerschool</i>	1	OSVIA	1
NIAS	2	MLS	1
<i>Christelijke Kweek School</i>	4	THS	2
	4	RHS	1
<i>Teknische School</i>	8	HIK	15
HBS + AMS		Lain-lain	25

Sumber: *Stat dari adanya anak-anak yang dapat pertolongan dari Studiefonds Mangkunegaran dalam boelan Joeli Vacantie Tahoen 2602*. Arsip No. A. 601. “Data tidak menunjukkan besaran dana yang diberikan kepada siswa”

Penurunan anggaran dan berkurangnya jumlah penerima *Studiefonds* selama masa pendudukan Jepang berdampak langsung pada besaran dana studi yang diberikan. Akibat keterbatasan fiskal, besaran bantuan studi harus dikurangi hingga mencapai lebih dari 50%. Adapun rincian penyusutan anggaran *Studiefonds* pada masa tersebut disajikan dalam data berikut:⁵⁵

Table 11. Penyusutan anggaran *Studiefonds* pada masa pendudukan kolonial Jepang

Sekolah	Jumlah siswa	Jumlah dana studi yang diperoleh
Sekolah Guru Putri	3	<i>f.</i> 2,-
Sekolah Guru Negeri	2	<i>f.</i> 2,-
Sekolah Menengah	6	<i>f.</i> 2,- sampai <i>f.</i> 3,- perbulan
Sekolah Menengah Tinggi	10	<i>f.</i> 2,5 sampai <i>f.</i> 4,- perbulan
Sekolah Keterampilan Putri	1	<i>f.</i> 4,-
Sekolah Teknik Menengah	1	<i>f.</i> 11,-

⁵³ *Rentjana Anggaran Keoeangan Mangkunegaran koti tahoen 2602, 2603, dan 2604*, Arsip No. K.292, K.117 dan K.241.

⁵⁴ *Stat dari adanya anak-anak yang dapat pertolongan dari Studiefonds Mangkunegaran dalam boelan Joeli Vacantie Tahoen 2602*, Arsip No. A. 601.

⁵⁵ *Berkas-berkas surat pemberian tahoe kepada orang toea moerid yang dikabulkan bolehnja minta pitolongan Dari banda pasinaon Mangkunegaran tahoen 2605*, Arsip No. A. 570.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

Sekolah Tabib Semarang	1	f. 60,- Pertahun
Sekolah Pertanian Menengah Tinggi	1	f. 180,- Pertahun
Sekolah Tehnik Tinggi	1	f. 128,- Pertahun

Sumber: *Berkas-berkas surat pemberian tahoe kepada orang toea moerid yang dikabulkan bolehnja minta Pitolongan dari banda pasinaon Mangkunegaran taheen 2605, Arsip No. A. 570*

Tabel di atas menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan dalam jumlah penerima *Studiefonds* dan besaran dana studi, dengan pemotongan hingga 50%. Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Belanda, perbedaan ini sangat mencolok. Pada masa Belanda, dana studi untuk jenjang setara SLTP berkisar antara f 5,- hingga f 15,-, untuk SLTA antara f 15,- hingga f 30,-, dan untuk pendidikan tinggi mencapai f 150,- hingga f 300,- per tahun. Data ini mencerminkan kemunduran signifikan dalam alokasi dana pendidikan selama masa pendudukan Jepang dibandingkan dengan periode kolonial Belanda.

KESIMPULAN

Pada awal abad ke-20, di tengah struktur kolonial yang membatasi akses pengetahuan bagi kaum pribumi, Praja Mangkunegaran mengambil langkah visioner yang melampaui zamannya. Narasi kemandirian ini dimulai pada tahun 1912, ketika sebuah lembaga keuangan khusus pendidikan bernama *Studiefonds Mangkunegaran* didirikan. Melalui legalitas *Pranatan Pustaka Praja (Rijksblad)* pada 15 Oktober 1913, lembaga ini bukan sekadar menjadi penyalur bantuan, melainkan menjadi simbol perlawanan terhadap pembatasan pendidikan kolonial.

Perjalanan *Studiefonds* mencatatkan sebuah transformasi sosial yang luar biasa. Pada fase awal, program ini dikenal sebagai *Studiefonds A* yang secara spesifik ditujukan bagi golongan bangsawan (*sentono*) dan *priyayi*. Namun, Mangkunegaran menyadari bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak bisa bertumpu pada segelintir elit saja. Maka, pada tahun 1915, sebuah gebrakan besar dilakukan melalui pembentukan *Studiefonds B*. Pintu pendidikan yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar bagi masyarakat umum non-bangsawan. Menariknya, sistem ini tidak bergantung pada belas kasihan kolonial, melainkan menggunakan model pembiayaan berkelanjutan. Dana untuk masyarakat umum ini bersumber dari pengembalian dana para alumni *Studiefonds A*, menciptakan sebuah siklus tanggung jawab sosial yang mencerminkan kemandirian finansial pribumi yang hakiki. Modernisasi lembaga ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Mangkunegara VII. Beliau melakukan restrukturisasi birokrasi dengan membentuk *Commissie van Advies* sebagai dewan pengawas yang profesional untuk menjamin distribusi dana yang adil dan proporsional. Lebih dari sekadar kebijakan politik, Mangkunegara VII menunjukkan komitmen moral yang tinggi dengan menyertakan dana dari *Kas Daleman* (dana pribadi) untuk memperkuat fondasi beasiswa. Tindakan ini mempertegas identitas *Studiefonds* sebagai instrumen filantropi

pribumi yang digerakkan oleh kepedulian tulus terhadap peningkatan derajat dan martabat rakyatnya. Pendidikan kini bukan lagi kemewahan, melainkan hak yang diperjuangkan secara kolektif.

Ujian terberat datang ketika matahari terbit dari Timur membawa pendudukan Jepang. Kondisi ekonomi makro yang carut-marut memaksa anggaran pendidikan merosot tajam hingga 50%. Meskipun jumlah penerima beasiswa berkurang drastis, *Studiefonds* menolak untuk menyerah. Program ini tetap dipertahankan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi akses pendidikan generasi muda. Keberlangsungan *Studiefonds* di masa krisis ini menjadi bukti nyata adanya resiliensi atau daya tahan. Mangkunegaran berhasil membuktikan bahwa meskipun di bawah tekanan penjajah, agensi dan partisipasi lokal tetap mampu menjaga api pengetahuan agar tidak padam. *Studiefonds* Mangkunegaran pada akhirnya adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa menolak untuk tetap berada dalam keterkungkungan. Pendidikan di tangan Mangkunegaran telah menjadi pemicu yang mengubah wajah sosial masyarakat, memicu mobilitas vertikal, dan meletakkan dasar bagi intelektualitas Indonesia modern. Penelitian ini menegaskan bahwa jauh sebelum model beasiswa modern dikenal luas, para pemimpin di Praja Mangkunegaran telah lebih dulu mempraktikkan kemandirian dan keadilan sosial melalui cara-cara yang sangat profesional dan bermartabat.

REFERENSI

- Ali, Mohammad. "Perkembangan Sekolah Muhammadiyah di Surakarta pada Tahun 1920-1970." *Jurnal Afkaruna* Vol. 15, No. 02 (2019): 302–327. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0107.302-327>.
- Azra, Azyumardi. *Surau; Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Besselaar, Gerrit. *Zuid-Afrika in de Letterkunde*. Amsterdam: Holl-Afrik Uitgevers-Mij, 1914.
- Broto, Panoedjoe Roewio Darmo. *Een en Ander Over Het Mangkoenagorosche Rijksstudiefonds*. Dalam *Het Triwindoe-Gedenboek Mangoe Nagoro VII*. Surakarta: Comite voor het Triwindoe-Gedenkboek, 1939.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, dari Budi Utomo sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997.

Kajian Terhadap Program Studiefonds di Mangkunegaran...

Ahmad Dzaky Benson Irani, Nor Huda, Moh Ashif Fuadi, Aan Ratmanto, Adrian Perkasa

“Hal Pertolongan Studiefond, Petikan dari Consept Pranatan Baharoe ketika pada 27 September 1925.” Arsip Mangkunegaran No. A.555.

Josowidagdo. “Seri Padoeka Kg.Gt.Pang.Ad.Ar. Mangkoe Nagoro VII dengan Pendidikan Kanak-kanak Rakyat.” Dalam *Het Triwindoe-Gedenkboek*.

Josowidagdo. “Sri Padoeka Kg.Gt.Pang.Ad.Ar. Mangkoe Nagoro VII dengan Pendidikan Kanak-kanak Rakyat.” Dalam *Het Triwindoe-Gedenkboek*.

Kosters, N. *Handboek voor Philantropisch en Maatschappelijk Werk in Ned. Oost en West Indie*. Soerabaja: N.V Koninklijke Boekhandel En Drukkerijen G. KOLFF, 1932.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1995.

Mangoenkoesoemo, Sarwoko. *Verslag van het Mangkoenagorosche Studiefonds over het Boekjaar 1930*. Mangkoenegaran: t.p., 1931.

Musyafa, Mokhammad Fadhil. “Sinar Surya Dari Balik Pare Muda: Peran KGPAA Mangkunegaran VII Dalam Pendidikan Keagamaan Islam di Mangkunegaran Tahun 1916-1944.” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* Vol. 2, No. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i1.4910>.

Nata, Abuddin. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2017.

Poeze, Harry A. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950*. Diterjemahkan oleh Hazil Tanzil. Jakarta: KPG, 2018.

Pringgokusumo, Husodo. *Dana Praja Mangkunegaran untuk Beasiswa*. Surakarta: Reksopustoko, 1989.

“Prospectus Solosche Van Deventerschool Vitgaande van de Solosche Van Deventer-Vereniging.” Arsip Mangkunegaran No. 791.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.

———. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.

“Rentjana Anggaran Keoeangan Mangkunegaran Koti Tahoen 2602, 2603, dan 2604.” Arsip Mangkunegaran No. K.292, K.117, dan K.241.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Diterjemahkan oleh Satrio Wahono dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Rijksblad Mangkoenegaran Tahun 1917 No. 20.

Rijksblaad Mangkunegaran No. 33 Tahun 1917.

Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Soembangsih. *Gedenkboek Boedi-Oetomo 1908-20 Mei-1918*. Amsterdam: Tijdschrift Nederl Indie Oud & Nieuw, 1918.

“Stat dari Adanja Anak-anak Jang Dapat Pertolongan dari Studiefonds Mangkunegaran dalam Boelan Joeli Vacantie Tahoen 2602.” Arsip Mangkunegaran No. A.601.

Statblaad Tahun 1914 No. 359.

“Tjitjilan Ngatoraken Wangsoel Ampilan Arta Studiefonds Saking Ngarsa Dhalem III 1940-1944.” Arsip Mangkunegaran No. P.254.

“Tweede Jaaverslag dari Mangkoenegarasche Studiefonds Diperiksa Sampai Penghabisan Tahoen 1924.” Arsip Mangkunegaran No. A.645.

Vereeniging Het Philologisch Studiefonds. *Statuten Reglement voor het Bestuur, Reglement voor de Stipendiaten*. Utrecht: Den Boer, 1909.

Wasino. “Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran (1900-1945).” Laporan Penelitian, IKIP Semarang, Semarang, 1996, tidak diterbitkan.

Wibowo, Guntur Arie. “Pendidikan dan Perubahan Sosial di Mangkunegaran Surakarta 1912-1940.” *Jurnal Agastya* Vol. 1, No. 2 (2011): 226–228. <http://e-journal.ikipgirimadiun.ac.id/index.php/JA/article/view/78>.

Zarro, M., Yunani, dan A.N. Dhita. “Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan.” *FACTUM: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* Vol. 3, No. 1 (2019): 61–68. <https://doi.org/10.17509/factum.v9i1.21503>.